



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 790/X/2013

I/OKTOBER 2013



DPR Minta Cina Buka Pasar Produk Indonesia



KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA OKTOBER 2013

Minggu Pertama Oktober, kegiatan Dewan ditandai dengan kedatangan Presiden Republik Rakyat Tiongkok beserta rombongan ke DPR RI dengan agenda Courtesy Call kepada Ketua DPR RI dan forum publik Presiden RRT dihadapan Anggota DPR dan Tokok-tokoh penting. Selain itu, terdapat agenda Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 2013, Laporan Ketua Komisi III dan Hasil Rapat Tim Pengawas Century 2 Oktober.

Courtesy Call Presiden RRT dengan Ketua DPR RI

Pada agenda ini, Ketua DPR RI didampingi oleh para Wakil Ketua DPR RI. Pada sambutannya, Ketua DPR RI memberikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran Presiden China, Yang Mulia Mr. Xi Jinping dan Ketua DPR RI juga mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau sebagai Presiden sejak 14 Maret 2013. Diharapkan, di bawah kepemimpinan H.E. Mr. Xi Jinping, RRT akan semakin dekat dengan Indonesia, dan semakin banyak bidang kerjasama yang dijalankan bagi kedua negara.

Dalam hubungan diplomatik kedua negara, telah ditegaskan kerjasama yang dibangun adalah dalam kerangka kemitraan strategis *Joint Declaration on Strategic Partnership* tanggal 25 April 2005, yang diperkuat dengan ditandatangani *Plan of Action strategis 2010-2015*. Kerjasama di berbagai bidang secara bilateral terus meningkat. Hal ini didorong oleh reformasi politik yang mulai dijalankan oleh Presiden Prof.Dr. BJ Habibie dan kemudian oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Pertemuan terakhir Presiden RI dengan Presiden RRT adalah sangat produktif dan memberikan momentum baru bagi penguatan kemitraan strategis, komprehensif kedua negara, antara lain; kerjasama di bidang teknologi.

DPR berharap pihak RRT berkenan melakukan transfer teknologi kepada Indonesia dalam bidang kerjasama teknologi angkasa dan teknologi militer. Dalam kaitannya dengan DPR RI, perlu dibangun kerjasama yang lebih intensif antar kedua parlemen, dalam bentuk saling kunjung.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Kerjasama bisnis dan perdagangan, kerjasama sektor pariwisata dan pendidikan.

Forum Publik Presiden RRT dihadapan Anggota DPR dan Tokoh-tokoh penting

Agenda kedua kunjungan Presiden China, H.E. MR. Xi Jinping ke DPR. Forum publik mengambil tempat di Pustaka Loka (Nusantara IV). Forum ini dihadiri Pimpinan MPR, DPR dan DPD, tokoh-tokoh penting serta undangan lainnya. Dalam pengantar pertemuan, Ketua DPR mengatakan bahwa sejak ditandatanganinya *MOU on the Resumption of Diplomatic Relations RI-RRT* di Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 1990, hubungan kedua Negara semakin berkembang baik, ditandai dengan saling melakukan kunjungan kenegaraan oleh kedua kepala negara, dan bahkan kunjungan timbal balik kedua parlemen telah dilakukan.

Kerjasama di berbagai bidang secara bilateral terus meningkat. Perkembangan ekonomi Indonesia dan peningkatan kerjasama bilateral ini tercermin antara lain dari meningkatnya minat investasi di antara para investor kedua negara. Peningkatan minat tersebut juga terlihat dari beberapa kunjungan delegasi kalangan pengusaha RRT ke Indonesia guna menjajaki kerjasama investasi.

Dalam bidang ekonomi, volume perdagangan kedua negara terus mengalami peningkatan. Volume perdagangan tersebut meningkat secara drastis, dari 26,6 miliar dolar AS pada 2009 menjadi 66,6 miliar dolar AS pada 2012. Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia, dan ditargetkan pada 2015 volume perdagangan



kedua negara meningkat menjadi 80 miliar dolar AS. Namun demikian, defisit perdagangan bagi Indonesia mencapai 5,7 miliar dolar AS. Hal yang positif bagi Indonesia, Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor non-migas Indonesia, yang pencapaian nilai eskpornya adalah terbesar selama periode Januari-Juli 2013, mencapai 12 miliar dolar AS. Di bidang investasi, jumlah investasi Tiongkok ke Indonesia pada 2012 tercatat 2,2 miliar dolar AS. Di sektor pariwisata bahkan jumlah turis Tiongkok ke Indonesia meningkat sekitar 14% dari tahun ke tahun sejak 2009.

Pada pidatonya, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa beberapa hal yang perlu diusahakan; **Pertama, memegang teguh kesepakatan dan membangun persahabatan.** Dengan tulus ikhlas Tiongkok ingin menjalin persahabatan dengan Negara-negara ASEAN dan terus menerus memperkuh asas saling percaya dibidang politik dan strategi. **Kedua, memegang teguh prinsip kerjasama saling menguntungkan.** Ada semboyan: “Kepentingan yang dipertimbangkan haruslah merupakan kepentingan bersama”. Tiongkok bersedia memperluas keterbukaan terhadap negara-negara ASEAN, supaya saling menguntungkan. **Ketiga, bahu membahu dan saling membantu.** Tiongkok dan ASEAN memikul tanggung jawab bersama-sama dalam mempertahankan kedamaian dan stabilitas kawasan. **Keempat, melakukan kerjasama diberbagai bidang.** Pepatah mengatakan “Pohon yang besar tumbuh dari tunas yang kecil, gedung yang tinggi pastilah dibangun dari dasarnya”. **Kelima, keterbukaan dan toleransi.** Pepatah mengatakan “Karena keluasannya, lautan mampu menampung air dari ratusan sungai”. Tiongkok dan ASEAN sama-sama menciptakan peradaban yang kaya dan gemilang.

Dalam pidatonya, Presiden Xi Jinping juga mengatakan bahwa Tiongkok akan berteguh pada kebijakan keterbukaan, berteguh pada jalan **sosialisme berkarakteristik Tiongkok**, berfokus pada urusan internal, terus mendorong pembangunan modernisasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Rapat Paripurna 1 Oktober

Rapat Paripurna mengagendakan acara; 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester (IHPS) I Tahun 2013 dan 2. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2013-2014, dilanjutkan dengan penetapan. Ketua BPK dalam laporannya mengatakan bahwa selama semester I Tahun 2013, telah memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp. 56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp.10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Adapun sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 779 kasus senilai Rp.46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau korektif lainnya.

Pengawasan dari DPR sangat diperlukan agar entitas segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang bernilai besar tersebut sehingga tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar. Selain itu, melalui pengawasan dari DPR diharapkan bisa dicari upaya-upaya preventif selain yang telah direkomendasikan BPK agar temuan yang selalu terjadi secara berulang tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.

Laporan Ketua Komisi III

Laporan ketua Komisi III mengenai hasil pembahasan dan pemilihan calon anggota LPSK periode 2013-2018 dan dilanjutkan dengan penetapan. Dalam laporannya, ketua komisi III mengatakan bahwa dalam rangkaian proses uji kelayakan atas calon anggota LPSK periode 2013-2018, telah memutuskan melalui pemungutan suara, terpilih 7 anggota diantara 14 calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketujuh calon yang terpilih adalah; 1. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M., 2. Edwin Partogi Pasaribu, S.H., 3. Lili Pintauli, S.H., M.H., 4. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, 5. Dr. H Askari Razak, S.H., M.H., 6. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum, 7. Prof. Dr. H. Teguh Siedarsono, S.Ik., S.H., M.Si.

Komisi III DPR RI memahami bahwa kecakapan, integritas dan kompetensi Calon Anggota LPSK Periode 2013-2018 merupakan prasyarat penting untuk menjadi Anggota LPSK. Atas dasar kriteria tersebut, Komisi III DPR RI dalam memilih dan menetapkan Calon Anggota LPSK Periode 2013-2018 sangat mengharapkan Calon Anggota LPSK Terpilih dapat menjadi Anggota LPSK yang mampu meningkatkan citra dan wibawa LPSK.

Tujuh calon yang telah terpilih oleh Komisi III disetujui rapat Paripurna DPR menjadi Calon Anggota LPSK periode 2013-2018.

Hasil Rapat Tim Pengawas Century 2 Oktober

Rapat Tim Pengawas Century dengan Menteri Keuangan, Dirut Bank Mutiara, Dewan Komisiner LPS, dan Forum Nasabah Bank Century dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013. Hasil kesimpulan rapat menyatakan bahwa Tim Pengawas Century merasa kecewa kepada Bank Mutiara yang tidak melaksanakan kesanggupannya untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383/PDT/2011, sesuai dengan kesimpulan Rapat Tim Pengawas Century dengan Menteri Keuangan, Dirut Bank Mutiara, Dewan Komisiner LPS dan Forum Nasabah Bank Century, tanggal 18 September 2013. Untuk itu Tim Pengawas Century mendesak Bank Mutiara untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838/PDT/2011 dan segera menyampaikan skema pengembalian dana Nasabah Antaboga Delta Sekuritas.



DPR Minta Cina Buka Pasar Produk Indonesia

Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta Pemerintah Cina untuk membuka pasar domestik bagi barang-barang produk asal Indonesia, dengan demikian neraca perdagangan kedua negara menjadi seimbang.

Menurut Marzuki, dalam bidang ekonomi, volume perdagangan kedua negara terus mengalami peningkatan. Volume perdagangan tersebut meningkat secara drastis, dari 26.6 Miliar dollar AS pada 2009 menjadi 66.6 Miliar dollar AS pada 2012 lalu. “Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia dan ditargetkan pada 2015 volume perdagangan kedua negara meningkat menjadi 80 Miliar Dollar AS, namun demikian defisit perdagangan bagi Indonesia mencapai 5.7 Miliar dollar AS,” ujarnya saat menyampaikan pidato menyambut kunjungan Presiden Cina, di ruang Pustakaloka DPR RI, Kamis, (3/10).

Dia menambahkan, hubungan perdagangan RI-Tiongkok yang tidak seimbang harus segera diperbaiki sebagaimana yang disampaikan Perdana Menteri Tiongkok beberapa waktu lalu bahwa negaranya tidak mau hidup dari surplus perdagangan dengan Indonesia.

“Hal yang positif bagi Indonesia, Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor non migas Indonesia yang pencapaiannya nilai ekspornya adalah terbesar selama periode Januari-

Juli 2013 mencapai 12 miliar dollar AS,” tandasnya.

Di bidang Investasi, jumlah investasi Cina (Tiongkok) ke Indonesia pada 2012 tercatat 2.2 miliar dollar AS. Di sektor pariwisata bahkan jumlah turis Tiongkok ke Indonesia meningkat sekitar 14 persen dari tahun ke tahun sejak 2009.

Kerjasama Infrastruktur:

Sementara Presiden Cina Xi Jinping mengharapkan kerjasama di bidang Infrastruktur semakin meningkat. Selain itu Pemerintah Cina juga berkomitmen untuk meningkatkan nilai kerjasama perdagangan bilateral antar kedua negara dimasa mendatang.

Selain itu Cina juga menyampaikan keinginannya untuk membangun infrastruktur terkait program MP3E yang digulirkan oleh Presiden RI. Menanggapi pernyataan Presiden Cina, DPR mendukung peningkatan kerjasama di berbagai bidang khususnya tukar menukar pelajar antara Indonesia dan Pemerintah Tiongkok. “Intinya pertemuan

itu juga membicarakan kerjasama di bidang pendidikan, dan kebudayaan antar kedua negara,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden China menggelar pertemuan dengan Pimpinan DPR, dengan sambutan istimewa. Dibanding hari-hari biasa, ada yang berbeda pada Kamis (3/10) di Gedung DPR RI. Ternyata DPR RI tengah menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping. Karpet merah dan keamanan semakin diperketat dalam rangka kunjungan kenegaraan tersebut.

Selain itu, puluhan wartawan asing dari berbagai negara juga berdatangan ke DPR RI, untuk menyaksikan dan meliput pidato kenegaraan Presiden Cina di Gedung Pustakaloka DPR RI tersebut. Tidak ketinggalan juga para juru foto dari media nasional berkerumunan untuk meliput acara itu.

Para Fotografer berbaris rapi di ruangan Ketua DPR RI Marzuki Alie, untuk mengabdikan peristiwa bersejarah itu, tidak berapa lama, Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Taufik Kurniawan, dan Pramono Anung Wibowo berjalan beriringan dan ber-

baris rapih didepan pintu lift lantai tiga ruangan Pimpinan DPR RI guna menyambut tamu negara tersebut.

Sempat terlihat Ketua DPR Marzuki Alie bertanya kepada media asing Cina mengenai kalimat selamat datang dalam bahasa Cina. Kemudian dijawab oleh juru foto tersebut, *huanying*. Politisi Demokrat tersebut kemudian mengulangi kalimat tersebut hingga hapal. Tidak terlalu lama Presiden Cina dan rombongan keluar dari lift dan menyalami Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR lainnya, dengan lancar ketua DPR RI akhirnya mengucapkan selamat datang dalam bahasa Cina.

Acara dilanjutkan dengan pertemuan tertutup di ruangan Ketua DPR RI selama kurang lebih 15 menit dan acara dilanjutkan di ruang Pustakaloka Nusantara V DPR. “Ini sesuatu yang baru bagi dan pertama kali bagi DPR RI karena tidak ada dalam Tatib terkait pidato didalam rapat paripurna DPR kemudian pidato diselenggarakan di ruang Pustakaloka,” ujar Ketua DPR RI kepada wartawan sesudah acara pidato tersebut, di DPR RI. (si), foto : tim parle/hr.

Perlu Perhatian Serius Terhadap Seks Bebas Kalangan Remaja

Fenomena maraknya seks bebas dan prostitusi di kalangan remaja perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Kasus yang terjadi di Surabaya, Juni lalu, dimana seorang siswi yang bekerja sebagai mucikari, bahkan sampai menjual kakak kandungnya sendiri, harus dikaji lebih mendalam.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian Pengolah Data dan Informasi (P3DI), menyelenggarakan diskusi, dengan tema; ‘Fenomena Maraknya Seks Bebas dan Prostitusi di Kalangan Remaja’. Acara berlangsung di Ruang Rapat Persipar, Gedung Nusantara II, Kamis (3/10).

“Terhadap permasalahan tersebut, P3DI sebagai unsur pendukung substansi DPR, perlu mengkaji lebih mendalam terhadap fenomena ini. Selain itu, hal ini juga perlu perlu dipahami oleh DPR dalam menjalankan fungsi kerjanya,” ujar Lukman Nur Hakim, selaku Panitia Penyelenggara sekaligus Peneliti di P3DI, saat ditemui usai acara.

Hadir sebagai pembicara adalah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, dan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Sarlito W Sarwono.

Dalam paparannya, Arist menjelaskan, dari 4726 anak yang diteliti, 93,7% remaja SMP dan SMA mengaku pernah berciuman, *genital stimulation*, hingga oral seks. Yang cukup mencengangkan, 62,7% remaja SMP mengaku sudah tidak perawan. Survey ini dilakukan oleh Komnas PA bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak di 12 kota besar pada tahun 2012.



Arist Merdeka Sirait dan Sarlito dalam diskusi; ‘Fenomena Maraknya Seks Bebas dan Prostitusi di Kalangan Remaja’, di gedung DPR.

“Pada sebagian besar remaja SMP dan SMA yang diteliti tergolong telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seksualitas, yaitu tentang organ seksual, fungsinya, bahkan juga kegiatan seksual,” jelas Arist.

Arist menambahkan, dari 1 Januari hingga Juni 2013 Komnas PA menerima pengaduan sebanyak 102 kasus terkait perilaku seks pada remaja. 54% diantaranya adalah untuk tujuan seks komersial. “Artinya kasus-kasus seperti ini cukup tinggi di dalam kehidupan anak remaja,” imbuh pria berkumis ini.

Sedangkan dari sisi kecanduan pornografi, tambah Arist, dari 2.818 anak kelas 4, 5 dan 6 SD di Jabotabek yang diteliti dalam kurun waktu 2010-2011, sebanyak 67% anak kecanduan pornografi. Menurutnya, semakin anak kecanduan pornografi, semakin ekstrim pula dia menjelajah, bahkan melakukan praktik seks bebas.

“Paradigma pengasuhan yang otoriter dari orang tua ke anak harus diubah menjadi pola pengasuhan yang aktif dan logis. Orang tua harus mendengarkan aspirasi anak. Jika orang tua tidak bisa menjawab pertanyaan dari anak, maka anak mencari jawaban itu sendiri. Pertanyaan dari anak harus diberi jawaban. Keluarga harus menjadi tempat curhat untuk anak, termasuk soal pendidikan seks ini,” jelas Arist.

Hal senada diungkapkan Sarlito. Ia menyatakan, orang

tua harus bisa mendidik anak untuk berpikir lebih kritis. Orang tua harus menjelaskan kepada anak, seks itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas, tetapi akan berbahaya untuk dilakukan.

“Bukan hanya tahu apa seks itu, tetapi mengapa dan bagaimana proses seks itu. Inti dari pendidikan seks adalah melindungi dari seks beresiko,” imbuh Sarlito. (sf) Foto:ry/parle.

Subsidi Listrik Terhadap Perusahaan Go Public Dihapus



Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit saat memimpin rapat.

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan menghapus subsidi listrik terhadap usaha besar, termasuk perusahaan-perusahaan kelas menengah yang sudah go public. UU Energi memperuntukkan subsidi listrik hanya untuk yang tidak mampu.

Demikian mengemuka dalam rapat Banggar dengan pemerintah, Rabu (2/10). “Amanah UU energi memperuntukkan hanya kepada pihak-pihak yang dianggap tidak berkemampuan subsidi itu diberikan,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit saat memimpin rapat. Saat ini setidaknya ada 61 perusahaan besar, termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public yang akan segera dihapus subsidi.

Terhadap industri menengah yang jumlahnya kurang lebih seribuan, juga akan dilakukan penyesuaian, mana saja yang sudah go public. Dari penyesuaian itu didapat sekitar 200 perusahaan yang juga akan dihapus subsidi. “Semua perusahaan menengah mestinya tidak mendapat subsidi,” harap Noor Supit. Dengan penghapusan itu, diharapkan para pengusaha besar dan menengah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya BPK telah mengungkapkan temuan beberapa perusahaan besar yang mendapat subsidi listrik itu. “Ini adalah catatan yang harus kita pertimbangkan, karena ini temuan BPK, karena tidak sejalan dg UU energi. Kita harus mengimplementasikan temuan BPK itu. Pengusaha itu harus di-warning,” tandas Noor Supit lagi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri saat yang sama mengakui bahwa subsidi listrik itu tidak tepat sasaran. Dan segera diproses untuk dihilangkan. Hanya saja, ia menyatakan, penghilangan itu tidak bisa dilakukan secara cepat, tapi harus bertahap. “Persoalannya ini soal timing, apakah kita bisa lakukan seketika atau tidak, kata Chatib.

Ada 10.300 perusahaan yang dihapus subsidi secara bertahap. Menkeu meminta dukungan Banggar untuk mengambil langkah ini. Penerapan tarif listrik memang harus dilakukan secara adil terhadap perusahaan-perusahaan besar, menengah, dan kecil, hingga tarif buat rumah tangga. “Kami mohon dukungan Banggar supaya proses ini menjadi jauh lebih rasional lebih mudah.” (mh), foto: od/parle/hr.

RUU PPDK : Belum Mulai Pembahasan Pemerintah Minta Lobby

Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan DPR RI (Pansus RUU PPDK) dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Rabu (2/10), dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah, pembentukan Panja dan pembahasan DIM, ditunda.

Rapat baru saja dibuka Ketua Pansus, Abdul Gaffar Pattape (F-PD), saat diberikan waktu untuk memberikan penjelasan, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengusulkan untuk melakukan lobby terkait RUU PPDK.

Usulan pemerintah tersebut, ditanggapi positif Ketua Pansus, namun dirinya meminta persetujuan terlebih

dahulu dari anggota Pansus RUU PPDK.

“Masalah lobby merupakan tradisi politik dan terbuka, justru lobby itu yang paling banyak menghasilkan keberhasilan. Lobby tradisi politik yang sangat memungkinkan. Selaku pimpinan pansus saya minta persetujuan dari anggota pansus,” kata Abdul Gaf-

far Pattape.

Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus RUU PPDK menyatakan pada prinsipnya setuju terhadap usul pemerintah, namun karena agenda rapat adalah penyerahan DIM dari pemerintah, pemerintah diminta menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan di lobbykan.

Wakil Ketua Pansus RUU PPDK, Alex Litaay (F-PDIP) menyatakan mestinya pansus melakukan pembahasan DIM terlebih dahulu, jika ada hal-hal yang krusial baru dilakukan lobby.

“Tapi okelah kali ini kita toleransi saja, dan saya kira kalau bisa ini lobby yang terakhir, kita sudah kebanyakan lobby, belum dimulai. Jika setelah pembahasan berkali-kali, lobby itu tidak apa-apa. Tapi kalau lobby ketika baru mau mulai, ini lucu juga,” papar Alex.

Alex juga menyatakan pada prinsipnya setuju saja dilakukan lobby, namun dengan catatan harus ada solusi. Karena menurutnya bangsa ini kurang solusi.

Senada Alex, Wakil Ketua Pansus, Edison Betaubun (F-PG) menyatakan sepanjang itu tidak untuk mengulur-ulur pembahasan RUU PPDK dan untuk kebaikan daerah-daerah kepu- lauan, sah-sah saja dilakukan lobby.



Wakil Ketua Pansus RUU PPDK, Alex Litaay berjabat tangan dengan Mendagri Gamawan Fauzi.

“Tetapi karena kita sudah terlalu lambat dalam pembahasan RUU ini, mungkin saja lobby-lobby itu lebih intensif kalau sudah masuk pada tahapan pembahasan DIM, tentu DIM yang disampaikan pemerintah sudah harus dicantumkan apa yang dipermasalahkan pemerintah”, jelas Edison.

Dalam kesempatan tersebut, menanggapi pernyataan anggota Pansus RUU PPDK, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengucapkan terima kasih atas diterimanya usul pemerintah untuk melakukan lobby. Gamawan menyampaikan lobby yang dilakukan hanya mengenai formula pembahasan RUU PPDK. (sc), foto : ry/parle/hr.

Perlu Hati-hati Ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang

Anggota Komisi I Mardani menyatakan perlu kehati-hatian Komisi I dalam melakukan ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Pasalnya, jika Konvensi ini sudah diratifikasi, maka akan berlaku *legally binding*, atau bersifat mengikat.

“Dalam proses ratifikasi ini, kita melihat ada langkah yang mesti kita tempuh secara hati-hati. Walaupun secara ruh kita setuju, namun dalam meratifikasi kita perlu masukkan dari berbagai pihak, karena ketika kita sudah meratifikasi, ini akan mengikat

kita,” ujar Politisi PKS ini di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Rabu (2/10) sore.

Mardani menyatakan, dengan adanya konvensi ini bisa saja menjadi bumerang untuk Indonesia sendiri. Pasalnya, ketika ada WNI yang merasa dihilangkan secara paksa, kemudian mengadu kepada pengadilan internasional, pengadilan bisa mengintervensi Indonesia, melalui konvensi internasional ini.

“Semua warga Indonesia ikut serta membangun, namun satu orang saja



Anggota Komisi I DPR Mardani.

bisa menghancurkan negeri ini. Di satu

sisi, orang-orang yang memiliki itikad buruk dan punya niat untuk mengancam Indonesia, bisa berlindung di konvensi ini,” imbuhnya.

Untuk itu, Komisi I meminta masukan dari Kepala Divisi Hukum Polri, Kepala Badan Pembina Hukum TNI, dan Komnas HAM. Mardani berharap, dengan adanya masukan ini, dapat membantu Komisi I dalam proses ratifikasi konvensi yang diinisiasi oleh Indonesia ini.

“Karena itu, masukan dari kawan-kawan ini, menurut kami memperkaya. Mereka mencoba menyesuaikan

draft konvensi ini kepada Tupoksi dari TNI dan Polri. Jangan sampai konvensi ini malah mengganggu tupoksi aparat negara ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Secara umum, konvensi ini sangat sesuai dengan ruh dari UUD 1945, karena salah satu dari tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah dan seluruh warga negara Indonesia,” papar Politisi dari Jawa Barat ini.

Dalam paparannya, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi menyatakan, harkat, martabat, dan hak asasi manusia perlu dijaga agar tidak terjadi perlakuan tidak manusiawi

atau merendahkan martabat manusia. Menurutnya, prinsip utama untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa haruslah menuruti peraturan atau dengan pengawasan yang efektif dari pengadilan ataupun pengawasan penguasaan lainnya.

“Sehingga diperlukan penetapan tindakan nasional dan internasional dalam hal menjamin perlakuan secara universal dan efektif, serta menghormati hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan dari penghilangan paksa,” tambah Anton. (sf), foto : od/parle/hr.

Pengelolaan Blok Mahakam Harus Dikembalikan ke Negara



Anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Wijaya dalam dialog di Press Room DPR.

Sudah hampir lima puluh tahun lamanya PT Total E&P yang notabene merupakan perusahaan asal Perancis dan Inpex Cooperation dari Jepang menjadi Penguasa Blok Mahakam. Tahun 2017 kontrak kerja keduanya dalam mengelola Blok Mahakam pun akan habis. Berangkat dari hal itu, Anggota Komisi I DPR RI, Chandra Tirta Wijaya mendesak pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Blok Migas tersebut.

“Walau sebentar lagi akan berakhir kontraknya namun pemerintah belum mengambil keputusan. Dan kelambatan pengambilan keputusan ini membuat kami dan sebagian anggota masyarakat menduga sebenarnya pemerintah akan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok penghasil Gas terbesar itu kepada pihak asing, dalam hal ini Total dan Inpex,” ungkap Chandra dalam jumpa pers nya yang digelar di Press Room, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (3/10).

Ditambahkan Chandra, selama ini Indonesia, dalam hal ini Pertamina dan BUMD lainnya hanya mendapatkan 30 persen hasil dari Blok Mahakam, sementara sisanya 35 persen masing-masing dimiliki oleh Total dan Inpex. Kondisi ini menurut politisi PAN ini sangat menyedihkan. Indonesia sebagai pemilik aset malah mendapatkan profit sharing yang paling kecil.

Oleh karena itulah ia meminta agar pemerintah tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam kembali kepada asing. Melainkan untuk memberikan kepercayaan kepada Pertamina dan BUMD lainnya untuk mengelola sendiri Blok Mahakam. Hal tersebut demi terciptanya kedaulatan energi di dalam negeri.

Hal serupa juga diungkapkan pengamat Migas, Kurtubi. Ia mengatakan dengan memperpanjang kontrak dengan asing akan berpotensi semakin merugikan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Blok Mahakam, ujar Kurtubi, memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi negara jika dikelola sendiri. Sebab, blok tersebut adalah penghasil gas terbesar di Indonesia. Dan keputusan terkait pengelolaan Blok Mahakam sangat mendesak. Karena akan berpengaruh pada ketersediaan gas dalam negeri.

“Sekarang kita kekurangan gas. Kalau Blok Mahakam kembali ke pangkuan ibu pertiwi, konversi minyak ke gas dapat berjalan dengan lancar. Dan kalau diberikan kepercayaan, saya yakin Pertamina mampu mengelola Blok tersebut,” ungkap Kurtubi sambil mengkritik bahwa kebijakan tata kelola migas pemerintah sudah melenceng dari arahnya. Kondisi demikianlah yang menurutnya akan berimbas ke anjloknya produksi, sehingga berpengaruh pada menujunya pasokan gas dalam negeri. (Ayu)foto: wy/parle

Komisi VII DPR Desak Kementerian LH Hentikan Kegiatan PT GDS dan AFN



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana didampingi Wakil Ketua Komisi VII Daryatmo Mardiyanto.

Komisi VII DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup RI, mendesak pemerintah provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Simalungun un-

tuk menghentikan sementara kegiatan PT Gorga Duma Sari (GDS), PT Aqua Farm Nusantara (AFN) di kawasan hutan Tele, di kawasan Danau Toba Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.

Demikian salah satu butir kesimpulan antara Komisi VII DPR dengan Menteri Lingkungan hidup dan LSM Pemerhati lingkungan hidup dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, di Gedung Nusantara I, Rabu, (2/10).

Dalam kesimpulannya, Komisi VII DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup menyetujui perlunya pelaksanaan hukum lingkungan terhadap PT Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm, PT Alegrindo dengan memperhatikan Kondisi kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Selain itu, Komisi VII DPR juga memerintahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk melakukan audit lingkungan kepada PT Gorga Duma Sari, Aqua Farm, dan PT Alegrindo Nusantara dengan memperhatikan tingkat kebauan yang sangat tinggi dan tingkat kecerahan air Danau Toba yang sangat rendah. (si) Foto: iwan armanias/parle.

Dirut Bank Mutiara Kecewakan Timwas Century DPR

Dirut Bank Mutiara Sukoriyanto Saputro tampil penuh tekanan. Jawabannya tak jelas dan sikapnya tidak konsisten. Skema pembayaran yang harusnya disampaikan di hadapan rapat Tim Pengawas (Timwas) Century, tidak dilakukan. Timwas menyatakan kecewa.

Demikian yang terjadi dalam rapat Timwas Century, Rabu (2/10). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dan dihadiri Kepala LPS, Dirjen Kementerian Keuangan, Dirut Bank Mutiara, dan Forum Nasabah Century. Tak ada kemajuan berarti dalam rapat kali ini, karena Dirut Bank Mutiara dinilai para anggota Timwas ingkar janji.

Padahal, pada rapat Timwas 18 September 2013, Dirut sudah menyatakan sanggup membayar dana nasabah Bank Century sesuai putusan MA, sekaligus akan memaparkan skema



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo saat memimpin rapat Timwas Century.

pembayarannya. Lagi-lagi kerja Timwas terhambat oleh sikap Dirut Bank Mutiara. Berkali-kali Pramono sebagai pemimpin rapat menegur Dirut Bank

Mutiara untuk lebih jelas memberi jawaban.

Sebelumnya, Dirut Bank Mutiara

beralasan, pihaknya sempat berkonsultasi lebih dulu dengan salah satu pimpinan KPK Adnan Pandupradja soal pembayaran dana nasabah Century. Menurut Dirut, mengutip pandangan Adnan, pembayaran belum bisa dilakukan bila tidak ada payung hukumnya. Spontan, jawaban Dirut itu dikritisi para anggota Timwas.

Hampir semua fraksi dalam Timwas tidak habis pikir, bagaimana putusan sudah berketetapan hukum tetap tidak bisa dijalankan dan malah mencari payung hukum lain. Nudirman Munir

(F-PG), misalnya, menyatakan, perlu klarifikasi ke KPK, bahkan bila perlu memanggil Adnan Pandupradja ke rapat Timwas untuk mengklarifikasi soal ini.

Indra (F- PKS), menyatakan, kemungkinan Dirut Bank Mutiara salah kutip atas pernyataan Adnan, karena hampir tidak mungkin orang yang mengerti hukum bisa memberi arahan seperti itu. Pramono lalu bertanya kembali kepada Dirut, apakah dirinya hadir dalam konsultasi dengan KPK tersebut. Sang Dirut menjawab, tidak hadir. Yang

hadir berkonsultasi ke KPK hanya tim pengacara Bank Mutiara.

Setelah ditanyakan kembali oleh Pramono, apakah pengacara Bank Mutiara hadir dalam rapat Timwas saat itu. Ternyata tidak ada satu pun dari tim pengacaranya yang mengikuti rapat Timwas untuk dimintai klarifikasinya. Chandra Tirta Wijaya (F-PAN) dengan tegas mengatakan, Bank Mutiara hanya memainkan waktu saja. Dan upaya mengulur-ulur waktu merupakan kejahatan terstruktur. (mh)

foto: wy/parle

DPR Dorong Kerjasama Nuklir dengan Iran



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat saat menerima cinderamata dari Ketua Delegasi Parlemen Iran Amir Khojasteh.

Sebagai Ketua Gerakan Non Blok (GNB) Periode 2012 – 2015, DPR memandang bahwa Iran menjadi mitra strategis Indonesia di Kawasan Timur Tengah. Untuk itu DPR akan terus mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih intensif, terutama dalam bidang IPTEK khususnya Nuklir.

Hal tersebut terungkap saat BKSAP dan GKSBR DPR RI menerima kunjungan Delegasi Parlemen Iran di gedung Parlemen, Selasa (1/10). Dalam kesempatan tersebut, Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Surahman Hidayat mengatakan bahwa kerjasama Indonesia dan Iran sudah berlangsung selama lebih dari enam puluh tahun.

Sejak masa itu tidak sedikit kerjasama dan perjanjian yang sudah berlangsung dan ditandatangani oleh kedua negara. Salah satunya penandatanganan MoU, Agreement on Co-

operation between Indonesia Chamber of Commerce and Industry dengan ICCIM untuk mempererat dan memperkuat kerjasama ekonomi.

Selain itu ditambahkan Ketua GKSB (Grup Kerjasama Bilateral) antara Indonesia-Iran, Ahmad Nizar Shihab, bahwa selain kerjasama dalam bidang ekonomi, ia juga mendorong agar kerjasama antara Indonesia dan Iran juga berlaku dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya

dalam bidang nuklir.

“Dalam bidang teknologi, khususnya nuklir Iran cukup unggul. Oleh karena itu kami mendorong agar Indonesia bisa bekerjasama dengan Iran dalam bidang tersebut. Misalnya dengan mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk belajar IPTEK khususnya nuklir di Iran. Begitupun sebaliknya,” jelas Nizar Shihab yang juga anggota Komisi IX ini.

Sebagai informasi Indonesia pernah abstain saat Dewan Keamanan (DK) PBB menjatuhkan sanksi untuk Iran lewat Resolusi 1803 di bulan Maret 2008. Saat itu Indonesia memahami tujuan program nuklir Iran yang dikembangkan untuk kepentingan energi yang murah dan murni untuk tujuan damai. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

Bantu Wilfrida, Perlu Lobi Tingkat Tinggi

Anggota Komisi IX DPR Djamal Aziz menyatakan bahwa untuk membantu Wilfrida, bukan hanya dibutuhkan pengacara. Ia menegaskan, diperlukan lobi tingkat tinggi antar pimpinan kedua negara.

“Bagi WNI yang bermasalah di luar negeri itu dilindungi oleh negara. Yang mewakili Indonesia itu Kementerian Luar Negeri. Pemerintah, yang saya anggap mewakili Presiden, tidak sensitif. Pemerintah hanya mengandalkan KBRI yang ada di Malaysia saja,” tegas Djamal menjawab pers di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (1/10).

Politisi Hanura ini meminta agar Menlu dapat mendatangi keluarga korban, dan meminta maaf secara baik-baik. Ia menilai, mungkin keluarga dapat memaafkan perbuatan Wilfrida, sehingga meringankan hukuman untuk TKI asal NTT ini.



Anggota Komisi IX DPR Djamal Aziz.

“Harus dilihat juga apa latar belakang kenapa sampai Wilfrida melakukan hal itu. Nanti kan bisa terbukti sikap brutal Wilfrida karena perlakuan majikannya,” tambah politisi asal Pulau Garam ini.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie optimis Wilfrida bisa dibebaskan dan segera kembali ke tanah air. Pasalnya, jika benar Wilfrida masih di bawah umur, maka tidak akan dikenakan hukuman sebagaimana untuk TKI yang telah dewasa.

“Kita melihat ada keinginan baik pemerintah Malaysia untuk mengecek apakah betul Wilfrida masih dibawah umur. Harapan kita Wilfrida bisa dibebaskan dan segera bisa kembali ke tanah air,” kata Marzuki Alie.

Marzuki mengaku, pihaknya sudah melakukan upaya agar Wilfrida dapat dibebaskan. Salah satunya dengan menandatangani petisi bersama sejumlah anggota DPR yang disampaikan kepada Pemerintah Malaysia saat HUT DPR RI, sebulan lalu. (mp,sf)/foto:odjie/parle/iw.

Rusia Harapkan Hubungan Indonesia-Australia Tetap Terjalin Baik

Rusia mengharapkan hubungan antara Indonesia dengan Australia tetap terjalin dengan baik, seperti yang selama ini tidak ada gangguan. Pasalnya hubungan baik Australia dan Indonesia terkait dengan keamanan di Asia Pasifik, dimana Rusia juga memiliki kepentingan di kawasan ini. Karena itu, Dubes Rusia berharap, adanya isu akhir-akhir ini mengenai retaknya hubungan Indonesia-Australia terkait dengan kasus pengungsi gelap, diharapkan bisa diselesaikan dengan baik.

“Rusia mengharapkan hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik, sebab Rusia sama-sama menjalin hubungan yang harmonis dengan Australia dan Indonesia,” kata Marzuki Alie mengutip penjelasan Dubes Rusia Mikhail Yurievich Galuzin ketika mengadakan pertemuan di Gedung DPR, Selasa (1/10).



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima Dubes Rusia.

Terkait dengan masalah Suriah, kata Marzuki Alie, Rusia mendukung usulan Indonesia yang disampaikan Presiden SBY di depan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir

Putin. Usulan Indonesia tersebut disambut baik Presiden Suriah dimana senjata yang dituduhkan digunakan dalam perang saudara tersebut, silahkan ahli-ahli luar untuk memeriksanya

dan memusnahkannya.

Berdasarkan informasi, ungkap Marzuki Alie, senjata kimia bukan digunakan oleh tentara pemerintah tetapi oleh tentara oposisi. Karena itu dia berharap, penyelesaian perang

saudara di Suriah ini berjalan dengan baik dan negara-negara asing jangan ada yang memihak, justru bisa menjadi penengah dan dilakukan rekonsiliasi serta pembicaraan perundingan kedua pihak.

Dikatakan Marzuki, itu adalah salah satu usulan yang disampaikan Presiden SBY yang diterima Presiden Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan baru-baru ini. (mp)/foto:odjie/parle/iw.

BPK Temukan 13 Ribu Kasus Kelemahan SPI

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2013, menemukan 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara.

“BPK telah merekomendasikan terhadap kasus-kasus tersebut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, dan perusahaan,” jelas Ketua BPK Hadi Poernomo ketika menyampaikan hasil pemeriksaan semester (Hapsem) I tahun anggaran 2013 di depan Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (1/10).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung itu, Hadi menjelaskan, temuan itu juga terdiri dari 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, 2.854 kasus penyimpangan administrasi, dan 779 kasus senilai Rp 46,24 triliun akibat ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Selama proses pemeriksaan, tambah Hadi, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 372,40 miliar.

“Jelas sekali, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai temuan BPK. Oleh karena itu, terhadap kasus yang merugikan negara itu perlu mendapat perhatian pimpinan dan anggota DPR untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjut atas kasus tersebut,” jelas Hadi.

Hadi menyatakan, pengawasan dari DPR sangat diperlukan agar entitas segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang bernilai besar tersebut, sehingga tidak terjadi kerugian negara yang semakin besar.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo saat menerima Hapsem I tahun anggaran 2013 dari Ketua BPK.

“Selain itu, melalui pengawasan dari DPR diharapkan bisa dicari upaya-upaya preventif selain yang telah direkomendasikan BPK agar temuan yang selalu terjadi secara berulang tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” harap Hadi.

Pada semester I tahun 2013 ini, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Usai melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan, Hadi menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kepada Pramono, dengan didampingi oleh Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

“Ikhtisar ini akan dikaji dan dianalisa, dan kemudian akan diteruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,” tutup Pramono. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IX DPR RI Minta Anggaran Kesehatan Ditambah

Terkait Anggaran Kesehatan 5% dari APBN sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati

meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk menaikkan anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, anggaran kesehatan 5% pada Kemenkes tersebut, termasuk didalamnya anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program



BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

“Kalau dicabut anggaran untuk PBI, maka anggaran untuk Kemenkes di 2014 hanya 1,3%. Dengan anggaran 1,3% itu mau buat apa terkait dengan BPJS Kesehatan,” kata Okky kepada Wakil Menteri Kesehatan saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali H. Situmorang di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (30/9)

Okky mengingatkan, salah satu staf dari Kemenkeu saat rapat dengan Komisi IX terdahulu, menyatakan bahwa anggaran kesehatan 5% itu merupakan kecelakaan UU, karena tidak seharusnya anggaran kesehatan itu masuk dalam UU sebanyak 5%.

Menurut hematnya, selama UU itu tidak melanggar UUD 1945 maka itu sah-sah saja jika suatu kementerian seperti Kementerian Kesehatan itu mempunyai anggaran 5%.

Dijelaskan Okky, anggaran Kemenkes tahun 2012 sebesar Rp 23 triliun, ditambah anggaran Tupoksi sehingga



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati.

menjadi Rp 33 triliun. Tahun 2013 sebesar Rp 36 triliun, dan 2014 sebesar Rp 24 Triliun. Sehingga jika dikurangi untuk anggaran PBI kalau dipresentasikan tinggal Rp 1,7 triliun.

Artinya ini jauh sekali dari UU, padahal menurutnya, ketika UU itu dibuat antara DPR dan Pemerintah, artinya ada bentuk komitmen bersama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Pak Wamen, tidak mengherankan jika Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu merosot terus dibandingkan dengan negara lain tetangga kita.

Karena anggaran kesehatannya saja tidak sampai 2%,” imbuh politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Okky minta Kemenkeu untuk melakukan keberpihakan kepada rakyat terkait dengan anggaran kesehatan.

“Saya berharap, di forum yang terhormat ini, Pak Wamen bisa memberikan dorongan atau masukan kepada Menteri Keuangan agar keberpihakan kepada rakyat terkait dengan anggaran kesehatan ini paling tidak mendekati 5%,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Okky juga menyoroti Kemenkes terkait anggaran ini. Okky bertanya kepada Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi yang hadir dalam rapat tersebut. Apakah Menteri Keuangan itu tidak menyetujui atau menerima 5% dari APBN, karena Kemenkes sendiri belum pernah memberikan kepada Kemenkeu mengenai *roadmap* mengenai anggaran sehingga bisa sampai 5% untuk APBN.

“Jika Kemenkes bisa memberikan itu, siapa tahu dengan melakukan penguatan-penguatan itu bisa dilaksanakan,” kata Okky. (sc) foto:ry/parle

Penyelesaian Pencari Suaka Harus Komprehensif

Persoalan imigran pencari suaka politik yang transit di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif, tidak parsial karena menyangkut banyak negara. Sudah ada sinyal positif dari pemerintah Australia untuk segera menyelesaikan masalah ini bersama pemerintah Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), Selasa (1/10). Seperti diketahui para imigran asal Timur Tengah yang terdampar di perairan Indonesia untuk transit, menyisakan banyak masalah. Perdana Menteri Australia Tony Abbott saat bertemu dengan Presiden SBY, sudah membuat banyak kesepakatan penting menyangkut manusia perahu dan penyelundupan manusia.

“Komisi I saat ketemu Menlu sudah

pernah mengangkat masalah *people smuggling* (penyelundupan manusia) dan sudah jadi perhatian Kemenlu. Saya kira Menlu punya sikap konsisten yang kita dukung,” kata Agus. Pihak Australia juga harus mengerti bahwa masalah ini tidak saja monopoli Australia. Penanganannya harus melibatkan negara asal para imigran, negara tujuan transit, dan negara tujuan suaka politik.

“Saya kira hasil pertemuan antara Presiden SBY dan Tony Abbott sangat positif. Australia sudah mengakui bahwa masalah *people smuggling* adalah masalah besar. Karena Australia sudah mengakui sebagai masalah bersama, maka ada indikasi kedua pemimpin negara akan mencari jalan keluar bersama. Tidak parsial,” ungkap Agus.



Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita.

Soal hubungan politik antara Australia dan Indonesia yang pasang surut, menurut Agus, itu hal biasa karena posisinya bertetangga. “Yang penting atas nama bangsa, kita bisa menegakkan kepala. Kita jaga prinsip dan kepentingan kita. Bila sudah pegang itu, apapun yang terjadi dengan naik-turunnya hubungan kita dengan Australia tidak ada masalah.” katanya. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi I Menyetujui Usulan DIM RUU Penyiaran

Komisi I DPR-RI menyetujui beberapa usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring pada Rapat Kerja pembahasan RUU Penyiaran (30/9), di Gedung DPR RI.

Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah membahas masalah kebebasan isi siaran yang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan media dan pemerintah.

Dalam rapat tersebut, isu kebebasan penyiaran memang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun DPR.

Anggota Komisi I, Nurul Arifin sempat mempertanyakan DIM ke 5 yang berisi tentang fungsi penyelenggaraan



Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin.

media yang bertanggungjawab dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, ada kecenderungan

otoritarianisme dalam pilihan redaksionalnya. "DIM ke 5 kalau tidak diikat berorientasi kepada kepentingan publik. Ini bisa bermasalah," ungkap Nurul.

Namun, Tifatul mempertahankan pendapatnya dan menyatakan pada pokoknya pemerintah tetap mengedepankan kebebasan penyiaran di Indonesia.

Rencananya rapat akan dilanjutkan pada pekan mendatang, dan meneruskan pembahasan DIM selanjutnya.

Dari keseluruhan 858 DIM, Tifatul menargetkan tahun ini dapat selesai membahas RUU Penyiaran. "Sudah 120-an DIM yang telah dibahas, akhir tahun kita targetkan selesai," papar Tifatul. (as)/foto:iwan armanias/parle

Sidang Paripurna DPR Tetapkan Anggota LPSK 2013-2018

Sidang Paripurna DPR RI menetapkan 7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2013-2018. Salah satu tugas penting yang harus diemban adalah bagaimana meningkatkan citra dan wibawa instansi yang dibentuk berdasarkan UU no.13/2006 ini.

"Kami sangat mengharapkan calon anggota LPSK terpilih dapat meningkatkan citra dan wibawa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," kata Wakil Ketua Komisi III, Al Muzammil Yusuf saat menyampaikan laporan dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/13).

Secara khusus politisi FPKS ini memberikan apresiasi kepada 14 kandidat yang telah diajukan Presiden RI untuk mengikuti *fit and proper test* di DPR. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah mendukung calonnya namun ternyata belum terpilih.

Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Pramono Anung kemudian meminta seluruh anggota LPSK terpilih untuk tampil di depan mimbar sidang paripurna untuk diperkenalkan kepada peserta rapat. Mereka adalah Abdul Haris Semendawai,



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo foto bersama anggota LPSK terpilih.

Edwin Partogi Pasaribu, Lili Pintauli, Hasto Atmojo, Askari Razak, Lies Sulistiani dan Teguh Soedarsono. Salah satu anggota Askari Razak berhalangan hadir dalam acara ini.

Anggota LPSK terpilih periode 2013-2018 terdiri dari gabungan 4 *incumbent* dan 3 anggota baru. Menurut Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika komposisi seperti ini sangat baik. "Saya kira cukup bagus kombinasi seperti ini, cukup menjanjikan juga karena LPSK inikan sedang dalam proses mencari bentuk. Kalau diganti baru semua justru itu menjadi tidak sehat," paparnya. (iky) foto:wy/parle.



Direktur Eksekutif IEA Sambangi DPR



Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menerima buku *Energy Outlook Southeast Asia*.

International Energy Agency (IEA) menyerahkan buku *Energy Outlook Southeast Asia* kepada anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dari Fraksi Partai Golkar. “Kunjungan mereka mendatang DPR RI yaitu untuk menyerahkan buku *energy outlook Southeast Asia* dan bertukar pikiran terkait kebijakan energi nasional, dimana dalam bukunya itu mereka juga melakukan pendataan kekayaan alam di asia tenggara, dan potensi suplai dan *demand* Energi Indonesia di masa mendatang,” ujar Satya sesuai menerima *Executive Director* IEA Maria Van Der Hoeven di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin, (30/9).

Menurut Satya, didalam laporannya mereka mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi produsen energi di masa mendatang. Palsanya, permintaan energi juga semakin meningkat. “ASEAN itu kebutuhan energi mencapai 120 juta ton di tahun 2011, lalu, dan akan meningkat 240 juta ton mtoe pada tahun 2035 mendatang, baik batubara, maupun *renewable energy*,” jelasnya.

Sementara terkait produksi CO₂, pada tahun 2014 Indonesia disebutkan emisinya akan mencapai 400 juta ton, sementara pada tahun 2035 akan mencapai 400 juta ton. “Indonesia harus menjaga agar pencemaran lingkungan semakin menurun, karena itu perlu adanya pengembangan teknologi yang mampu *capture CO2* itu,” ujarnya.

IEA didirikan pada tahun 1974 sebagai reaksi dari krisis minyak dunia yang disebabkan Perang Arab-Israel

1973. Tujuan awal dari IEA adalah untuk membantu negara anggota OECD (sebagai organisasi patron IEA) mengatasi krisis energi dengan cara melepas stok minyak, meningkatkan kerjasama dengan negara non-OECD serta organisasi dan lembaga internasional lain dalam hal kebijakan energi, meningkatkan penggunaan energi non-fosil dan menerapkan efisiensi energi melalui aplikasi teknologi energi serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dan energi.

Keanggotaan IEA, saat ini tercatat 28 negara sebagai anggota IEA dimana semuanya adalah anggota OECD. Namun tidak berarti negara anggota OECD secara otomatis menjadi anggota IEA karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya: sebagai negara importir, memiliki cadangan minyak setara 90 hari dimana Pemerintah dapat mengakses langsung penggunaannya; memiliki program pengaturan kebutuhan yang dapat mengurangi konsumsi minyak sebesar 10%; memiliki regulasi dan organisasi yang dapat menjalankan sistem *Co-ordinated Emergency Response Measures* (CERM); memiliki regulasi dan organisasi yang dapat memastikan semua perusahaan energi untuk memberikan informasi yang dimiliki. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII DPR RI Tidak Gunakan Kuota Jemaah Haji 1434 H/2013

Setelah melakukan pengawasan secara langsung persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1434 H/2013 M yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji hingga pada pelepasan jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama secara serempak dari berbagai daerah pada Selasa 10 September 2013 lalu. Awal Oktober ini DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI juga akan melakukan pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji 1434 H/2013 M langsung dari Tanah Suci.

“Kami ingin memastikan apakah penyelenggaraan Ibadah Haji 1434 H/2013 ini telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji atau tidak,” jelas Anggota Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily saat acara Dialog interaktif bersama wakil rakyat kerjasama RRI



Anggota Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily.

dengan Setjen DPR RI, Jumat (4/10).

Ditambahkannya maka dari DPR RI sebagai pengawas juga tidak segan untuk memberlakukan sanksi jika memang dalam penyelenggaraan ibadah haji 1434 H/2013 M nanti ditemui kesalahan yang disengaja. Hal tersebut semata agar penyelenggaraan ibadah haji mendatang dapat berjalan lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini Ace juga menegaskan bahwa dalam melakukan fungsi pengawasannya secara langsung dari Tanah Suci ini, sebagai wakil rakyat, DPR RI TIDAK MENGGUNAKAN Kuota haji Jemaah Haji 1434 H/2013 M. Terlebih

lagi pada tahun ini Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pemotongan Kuota Jamaah haji terhadap berbagai Negara termasuk Indonesia, akibat belum selesainya proses renovasi di area Masjidil Haram dan tempat-tempat ibadah lainnya di Arab Saudi.

“Kami tidak menggunakan kuota jemaah haji 1434 H, tapi non kuota. Selain itu yang perlu disampaikan disini juga bahwa anggota DPR dalam melakukan kunjungan pengawasan ini tidak dibiayai oleh Kementerian agama melainkan menggunakan DIPA Anggaran DPR RI Tahun 2013 ini,” tegasnya. (Ayu) foto: od/parle.

DPR Harap Ada Jalur Khusus Sepeda



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat mengikuti Sepeda Sehat dalam rangka HUT DPR RI ke-68.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengharapkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan jalan khusus bagi penggemar sepeda baik untuk kegiatan dalam bekerja sehari-hari maupun bagi anak-anak yang akan bersekolah.

“Selain menyehatkan badan, bersepeda sangat ramah lingkungan, karena tidak menggunakan energi manusia, tidak menggunakan energi fosil dan lain sebagainya yang mencemari udara,” kata Marzuki Alie dalam sambutannya saat membuka acara Sepeda Sehat Senayan 2013 dalam rangka memperingati HUT DPR RI ke-68, di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (29/9)

Marzuki berharap, semakin banyak orang menggunakan sepeda semakin banyak orang Indonesia menjadi sehat baik jasmani maupun rohani, dan Jakarta bebas polusi.

Dijelaskan Marzuki, Sepeda Sehat Senayan 2013 merupakan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 DPR RI.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Sepeda Sehat Senayan 2013 diikuti 33 komunitas sepeda se DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan khusus pada hari ini kami menyediakan berbagai hadiah door prize dalam bentuk barang dan lain sebagainya,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Untuk itu, Marzuki mengajak seluruh peserta sepeda sehat agar tidak melihat hadiahnya. Paling penting adalah bersemangat ikut acara Sepeda Sehat Senayan 2013 sehingga tubuh dan jiwa menjadi sehat. “Dengan jiwa sehat insyaallah moral kita menjadi sehat,” tegas Marzuki.

Acara Sepeda Sehat Senayan 2013 dimeriahkan Marching Band dari para siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan atraksi sepeda dari Wim Cycle.

Sepeda Sehat Senayan 2013 diikuti kurang lebih 5.000 peserta dari DKI Jakarta dan sekitarnya, mulai Ketua DPR RI didampingi istri, Sekretaris Jenderal DPR RI beserta jajarannya, karyawan dan karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI beserta keluarga. (sc), foto: tim parle/parle.

Trimed Sayangkan Wartawan Menolak Jadi Saksi

Ketua Badan Kehormatan - BK DPR RI Trimedya Panjaitan menyayangkan penolakan Misbahul Munir, wartawan media on line OKzone, saksi mata dugaan 'lobi toilet' antara anggota Komisi III Bahrudin Nashori dengan calon hakim agung Sudrajat Dimiyati. Penolakan itu menurutnya disampaikan dalam surat yang ditandatangani pemimpin redaksi yang bersangkutan.

"Kita terima surat 27 September ditandatangani Pemred OKzone, M. Budi Santosa bahwa beliau tidak bisa hadir karena menganggap penjelasan sudah cukup dalam pemberitaan yang dimuat tempo hari," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/13).

BK DPR telah menjadwalkan pemeriksaan 3 pihak dalam sidang kali ini. Namun yang hadir hanya Bahrudin dan



Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan.

Sudrajat. Bagi Trimed sangat penting untuk langsung mendengar keterangan wartawan sebagai pihak yang meng-

aku melihat ada penyerahan amplop.

"Kita ingin menggali lebih dalam, benar tidak Bahrudin hanya mengeluarkan kertas selebar atau dia melihat amplop. Itu kan beda, kalau menulis ada amplop kan pasti ada isinya," lanjut polisi FPDIP ini.

Ketika ditanya wartawan soal kemungkinan upaya pemanggilan paksa, Trimed yang juga anggota Komisi III ini mengatakan belum perlu.

"Belum sampai kesanalahan, tapi kita akan mencoba mengimbau lagi, kalau poinnya ingin bersama-sama membenahi DPR dan kita selama ini banyak dibantu wartawan, udah tanggung. Seharusnya mau terus membongkar ini. Jadi kita himbau semoga bisa hadir," demikian Trimed. (iky)/foto:od/parle.

Revisi UU Pilpres Dihentikan



Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Baleg), Kamis (3/10), memutuskan pembahasan penyusunan draft RUU Perubahan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) dihentikan.

Baleg juga memutuskan RUU Perubahan RUU Pilpres tersebut dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Musyawarah mufakat secara mate-

matis adalah keputusan bahwa pembahasan terhadap penyusunan draft RUU Perubahan tentang RUU Pilpres, kita nyatakan dihentikan," kata Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Mulyono mengatakan pihaknya akan segera melaporkan kepada sidang paripurna bahwa RUU tersebut dihentikan. Selain itu laporan juga ditujukan kepada Menkumham, Amir Syamsud-

din sebagai perwakilan pemerintah.

Rapat Pleno tersebut, diwarnai aksi walk out dari Anggota Baleg, Ahmad Yani (F-PPP) dan Djamal Aziz (F-Hanura). Mereka menganggap rapat tidak konstitusional.

"Ini saya yakin, tidak dapat memenuhi harapan lagi, ini kepentingan partai besar," kata Djamal.

Sebagaimana diketahui, pada rapat pleno Baleg sebelumnya, Rabu (25/9), lima fraksi antara lain F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PKB, dan F-PAN menyatakan menolak pembahasan penyusunan draft RUU perubahan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

Sedangkan, FPKS, FPPP, F-Hanura dan F-Gerindra memutuskan tetap dilanjutkan pembahasan penyusunan draft RUU Perubahan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. (sc) foto: ad/parle

Hukuman Mati Bagi Akil, Revolusi Penegakan Hukum

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika mengaku prihatin mendapat kabar tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar dalam kasus dugaan suap. Baginya kondisi ini menunjukkan bangsa memerlukan revolusi dalam penegakan hukum bukan lagi sekedar reformasi hukum. Itu bisa dimulai dengan hukuman mati bagi sang hakim konstitusi.

“Salah satu pemberat orang dihukum adalah posisi jabatannya. Kalau proses hukum ternyata memenuhi semua persyaratan demi rasa keadilan ide Pak Jimly (hukuman mati bagi hakim Akil) perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari revolusi penegakan hukum,” tandasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/13).

Ia menyebut sejumlah langkah reformasi peradilan seperti peningkatan anggaran, kenaikan gaji, remunerasi



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

ternyata belum cukup kuat mendorong penegak hukum bekerja dengan baik. Apalagi dalam RDPU minggu ini komisi yang dipimpinnya baru saja menerima data sepak terjang mafia hukum yang mengatur sejumlah kasus yang ditangani aparat.

“Dalam konteks revolusi hukum itu KPK kita dorong untuk fokus menangani kasus-kasus besar, yang kecil tinggalkan dulu, yang *big fish* kita sikat rame-rame,” papar politisi FPD yang tahun depan mencalonkan diri menjadi senator DPD.

Ia berharap dalam kasus suap Ketua MK ini segenap pihak tidak rame-rame mengusulkan mengganti sistem yang sudah ada. Baginya yang penting sekarang adalah perbaikan, khusus bagi MK perlu mengefektifkan pengawasan bagi para hakim karena kekuasaan tanpa pengawasan pasti korup.

“Majelis kehormatan sudah dibentuk silahkan bekerja tetapi bagi saya begitu tersangka ditetapkan KPK, jangan sampai lewat 1x24 jam, segera beri sanksi diberhentikan dengan tidak hormat dari MK. Soalnya ini hakim yang memegang palu atas nama Tuhan,” pungkas dia. (iky)foto:od/parle

Komisi V DPR Serap Persoalan Infrastruktur Yogyakarta dan Jateng



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR ke Yogyakarta dan Jateng.

Komisi V DPR menyerap aspirasi persoalan infrastruktur di Yogyakarta dan Jateng. Diantaranya meninjau kawasan Pantai yang mengalami abrasi, Jalan Lintas Selatan Selatan (JLSS), dan kawasan wisata Borobudur.

“Intinya kunjungan ke Yogyakarta dan sekitarnya ini dalam rangka meli-

hat kesiapan infrastruktur jalan dan pemukiman di wilayah tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Watimena saat Kunjer spesifik kedua Provinsi tersebut, baru-baru ini.

Menurutnya, tim juga telah melakukan sejumlah pengawasan seperti pantai Samas, Pantai Kuwaru terkait abrasi di wilayah itu. “Kita minta *stakeholder* dan jajaran Pemda, Pemkot serta mitra kerja untuk meningkatkan perannya, serta kerjasama semua pihak,” tandasnya.

Melalui kerjasama itu, lanjutnya, diharapkan persoalan infrastruktur dapat diselesaikan dan pembangunan semakin maksimal.

Selain itu, Komisi V DPR juga mendukung pembangunan lapangan terbang di Kulonprogo karena untuk meningkatkan akses serta ekonomi di kawasan Yogyakarta, “Ini akan kita perjuangkan bersama selain itu juga soal air bersih di Gunung Kidul,” tambahnya.

Saat menyerap aspirasi di Magelang, Anggota DPR dari PDIP Sudjadi mengatakan, dirinya akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan terminal di Magelang. Namun dengan syarat persoalan tanah dan *Detail Engineering Design* (DED) harus tuntas. Selain itu, khusus program air baku dan minum pedesaan, lanjutnya, perlu segera didata secara menyeluruh oleh Kabupaten setempat. (si)

Seapac Gelar Sidang Umum di Medan 23-24 Oktober

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, SEAPAC saat ini sedang menyiapkan Program Parliamentary Information Resources for Anti-Corruption Knowledge yang akan menyediakan basis data tentang langkah-langkah pencegahan tindak korupsi di negara-negara Asia Tenggara.

“Kita akan menyiapkan peta korupsi di parlemen, di pemerintahan dan di dunia usaha dan juga hal yang berkaitan dengan pencucian uang. Masalah pencucian sudah terjadi di lintas negara dan di beberapa negara memberikan ruang terjadinya kasus tersebut,” jelas Pramono pada jumpa pers Kamis (3/10). Sidang Umum Seapac akan digelar di Medan pada 23-24 Oktober mendatang.

Dalam acara ini hadir juga anggota Komisi III Fahri Hamzah dari Fraksi PKS dan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Yenti Garnasih.

Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan sebagai pengelompokan regional GOPAC dan merupakan gugus tugas regional GOPAC untuk Asia Tenggara. SEAPAC bertujuan untuk memberantas korupsi secara menyeluruh di dalam lembaga-lembaga yang mengung-ung kepentingan publik, terutama di parlemen dan institusi-institusi pemerintah.

Agenda Sidang Umum meliputi pembahasan *Plan of Action* dan penguatan struktur organisasi SEAPAC, serta diskusi tematik tentang dampak patronase politik terhadap korupsi. Selain itu dimaksudkan pula untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara di Asia Tenggara dalam penanggulangan korupsi, berbagi pengalaman dalam pemberantasan korupsi dan mencanangkan *Plan of Action* tentang pemberantasan korupsi di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya Pramono Anung

menjelaskan, korupsi dan kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional dan dikatakan setara dengan kejahatan terorisme serta kejahatan transnasional lainnya. Untuk itulah, upaya memerangi kejahatan tersebut harus pula bersifat lintas batas dengan melibatkan kerjasama baik regional maupun internasional.

men Indonesia yang memiliki kemampuan, kepedulian dan komitmen yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah anti-korupsi. Gugus Tugas Nasional GOPAC Indonesia didirikan sejak 12 Desember 2012 melalui Deklarasi Pembentukan Gugus Tugas Nasional.

Ketua Gugus Tugas Nasional dijabat



Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Pakar Hukum Pidana dan Pencucian Uang Yenti Garnasih dan Anggota Komisi III DPR Fachri Hamzah dalam Dialektika Demokrasi di Press Room DPR.

Saat ini jumlah pencucian uang secara global diperkirakan mencapai 800 Miliar hingga 2 Triliun Dolar Amerika Serikat. Oleh karenanya sangat dibutuhkan komitmen politik baik di level regional maupun global terhadap isu tersebut.

Ketua DPR RI saat ini menjabat sebagai Ketua SEAPAC dan Wakil Ketua Parlemen Thailand Surachai Liengboonlertchan sebagai Wakil Ketua SEAPAC. Terpilihnya Ketua DPR RI sebagai Ketua SEAPAC karena Indonesia saat ini telah mengimplementasikan sebagian besar prinsip-prinsip UNCAC sehingga dengan kepemimpinan Indonesia, anggota SEAPAC lainnya dapat mengambil pembelajaran.

Gugus Tugas Nasional

Gugus Tugas Parlemen Anti-Korupsi adalah kaukus untuk anggota parle-

oleh Pramono Anung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bidang Korinbang. Saat ini sekitar 30 orang anggota DPR RI tergabung dalam Gugus Tugas Nasional. Anggota Gugus Tugas merupakan lintas komisi dan lintas fraksi, terutama para anggota DPR RI yang bertugas dalam bidang keuangan, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Komisi I, Komisi III (Hukum), serta anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Melalui pembentukan Gugus Tugas Nasional GOPAC Indonesia, anggota DPR RI secara signifikan dapat berkontribusi untuk memerangi korupsi terutama ditengah ketidakpercayaan public terhadap lembaga parlemen. Gugus Tugas Nasional GOPAC Indonesia menunjukkan bahwa anggota DPR RI memiliki komitmen terhadap isu anti korupsi. (mp)Foto:wy/parle.



Suasana usai RDPU Komisi III DPR dipimpin Gede Pasek Suardika ketika menerima pengaduan publik terkait mafia peradilan dan kriminalisasi sejumlah kasus, Selasa (1/10). Foto: Wahyu/Parle.



Wakil Ketua Komisi V Michael Watimena menyerahkan cinderamata kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyoninditio di Pendopo Pengayoman Kota Magelang, Jumat (27/9). Foto: Gengsu/Parle.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Michael Watimena mengunjungi Pantai Samas dan Kuwaru yang terkena abrasi di Yogyakarta, Kamis (26/9). Foto: Gengsu/Parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti serta masyarakat umum mengikuti Sepeda Santai dalam rangkaian HUT DPR ke-68, Minggu (29/9). Foto: Tim Parle.